

Evaluasi Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025

Anastasia E Andinny Goran Tokan^{1*}, Florentina Maria Iness Oematan Lape¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : gorantokandini@gmail.com

Article History:

Received : 14-01-2026

Accepted : 22-01-2026

Keywords: ASEAN; Konflik Thailand dan Kamboja; Keamanan Regional; Resolusi Konflik; Diplomasi Regional

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025 sekali lagi menyoroti kerentanan situasi keamanan di Asia Tenggara, khususnya mengingat sengketa perbatasan yang berakar pada sejarah kolonial dan klaim teritorial yang belum terselesaikan. Eskalasi konflik ini tidak hanya merusak hubungan bilateral antara kedua negara tetapi juga menyebabkan krisis kemanusiaan dan secara serius menantang kredibilitas ASEAN sebagai sebuah organisasi perdamaian regional. Studi ini meneliti bagaimana peran ASEAN dalam mengelola konflik Thailand-Kamboja pada tahun 2025 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan teoretis neoliberal dan teori resolusi konflik milik Johan Galtung untuk menilai efektivitas mekanisme ASEAN dalam mempromosikan de-eskalasi dan resolusi konflik. Temuan menunjukkan bahwa ASEAN memainkan peran penting sebagai fasilitator dialog, mediator diplomatik, dan pendukung gencatan senjata melalui mekanisme ASEAN *Way* dan penempatan tim pengamat. Namun, peran ini masih terbatas pada pembentukan perdamaian sosial dan belum mampu mengatasi secara komprehensif penyebab struktural konflik. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun ASEAN tetap berupaya secara relevan sebagai aktor keamanan regional, penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme respons konflik diperlukan untuk memastikan bahwa ASEAN mampu membangun perdamaian yang lebih berkelanjutan di masa depan.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali berkobar pada tahun 2025, menjadi salah satu krisis terburuk di Asia Tenggara dalam dekade terakhir. Eskalasi kekerasan tersebut berakar dari sengketa perbatasan era kolonial, khususnya di area sekitar situs-situs candi seperti Preah Vihear dan di daerah-daerah di mana perbatasan antara kedua negara masih belum jelas. Bentrokan yang berlangsung sepanjang tahun tersebut mengakibatkan puluhan kematian, ribuan pengungsi, dan evakuasi massal warga sipil dari zona konflik. Hal ini memperburuk situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah perbatasan antara kedua negara (Wiranto, 2025).

Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran besar baik di dalam negeri maupun di tingkat regional, karena konflik antara anggota ASEAN tidak hanya memengaruhi hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja, tetapi juga mempertanyakan prinsip komunitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Berbagai tokoh dan lembaga internasional telah menekankan dalam pernyataan mereka tentang urgensi mediasi dan upaya

perdamaian, sementara laporan-laporan menyebutkan tekanan dari kekuatan eksternal seperti Tiongkok dan AS sebagai faktor yang meningkatkan upaya untuk mencapai negosiasi dan gencatan senjata pada tahun 2025 (Reuters, 2025). Perlu dicatat bahwa konflik ini juga mencerminkan kompleksitas dinamika keamanan regional di Asia Tenggara, yang dibentuk oleh faktor-faktor politik domestik, nasionalisme, dan kepentingan geopolitik.

Dalam konteks ini, peran ASEAN sebagai organisasi regional yang berlandaskan prinsip-prinsip non-intervensi, dialog, dan penyelesaian konflik secara damai sedang diuji secara maksimal. Tradisi ASEAN, yang disebut *ASEAN Way*, yang berlandaskan konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dan penyelesaian konflik secara damai, menghadapi tantangan signifikan ketika konflik bersenjata antar negara anggota terus berlanjut tanpa intervensi eksternal atau mediasi pihak ketiga yang intensif (Setyowati, Herning; Nurulita, 2023). Berbagai langkah telah diambil, seperti penarikan tim pengamat ASEAN untuk mendorong de-eskalasi, dan pertemuan para menteri luar negeri ASEAN untuk membahas langkah-langkah penyelesaian konflik (Jingga, 2025a).

Respons komunitas internasional dan aktor regional menggarisbawahi urgensi keterlibatan ASEAN dalam krisis ini. Klaim teritorial yang saling bertentangan dan penggunaan kekuatan militer menawarkan negara-negara mitra seperti Tiongkok, kesempatan untuk campur tangan dalam konflik melalui diplomasi dan membujuk kedua belah pihak untuk menyetujui gencatan senjata, sekaligus memberikan tekanan eksternal untuk menstabilkan kawasan tersebut (Reuters, 2025). Dalam pengertian yang lebih luas, dinamika ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mempertahankan kredibilitasnya sebagai wadah untuk negosiasi perdamaian dan sebagai pembentuk norma kolektif dalam menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal.

Di satu sisi, keterlibatan ASEAN menunjukkan komitmen regional terhadap penyelesaian konflik secara damai tanpa intervensi eksternal. Di sisi lain, otoritas ASEAN yang terbatas, mekanisme penegakan hukum yang lemah, dan perbedaan kepentingan politik negara-negara anggotanya seringkali menghambat upaya menuju penyelesaian konflik yang komprehensif. Situasi ini telah memicu perdebatan tentang sejauh mana ASEAN dapat memainkan peran aktif dan efektif dalam mengelola konflik Thailand dan Kamboja, khususnya pada tahun 2025, yang penuh dengan dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks.

Dengan latar belakang ini, sangat penting untuk menilai peran ASEAN dalam mengelola konflik Thailand dan Kamboja pada tahun 2025. Penilaian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan, instrumen, dan strategi diplomatik ASEAN dalam mengurangi konflik dan menjaga stabilitas regional. Lebih lanjut, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi ASEAN sebagai aktor keamanan regional, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai “Bagaimana Evaluasi Peran ASEAN dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025?” untuk memahami peran ASEAN dan keefektifitasan ASEAN dalam menangani konflik di regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran

ASEAN dalam menangani konflik Thailand–Kamboja tahun 2025 melalui analisis terhadap dinamika diplomasi, kebijakan, dan mekanisme resolusi konflik regional. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai upaya yang dilakukan ASEAN dalam merespons eskalasi konflik (Safaruddin, 2023).

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi laporan resmi ASEAN, pernyataan pemerintah, publikasi lembaga internasional, serta pemberitaan media internasional yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola peran, strategi, dan keterbatasan ASEAN dalam menangani konflik.

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teoretis Neoliberalisme dan teori resolusi konflik Johan Galtung. Perspektif Neoliberalisme digunakan untuk memahami ASEAN sebagai institusi regional yang memfasilitasi kerja sama antarnegara melalui norma, aturan, dan mekanisme kolektif (Dugis, 2016). Sementara itu, teori resolusi konflik Galtung digunakan untuk menilai sejauh mana peran ASEAN berkontribusi pada penciptaan perdamaian, baik dalam bentuk *negative peace* maupun *positive peace* (Khaswara, 2021). Penggunaan metode kualitatif yang dipadukan dengan kedua kerangka teoretis tersebut memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi secara komprehensif efektivitas dan keterbatasan peran ASEAN dalam mempromosikan resolusi konflik yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025

Konflik antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025 merupakan peningkatan besar dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama di sepanjang perbatasan 817 kilometer antara kedua negara. Ketegangan mencapai puncaknya pada Juli 2025 ketika bentrokan bersenjata meletus di beberapa titik perbatasan, termasuk di sekitar Ta Muen Thom. Tembakan artileri, serangan udara, dan ranjau darat digunakan, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Puluhan orang tewas, ribuan terluka, dan ratusan ribu penduduk terpaksa mengungsi dari rumah mereka (Saputra, 2025).

Dari masalah tersebut, pemerintah Thailand dan Kamboja saling tuduh sebagai pihak yang memicu serangan, dan hingga hari ini masih belum jelas siapa yang memulai konflik tersebut. Eskalasi ini dianggap sebagai yang paling serius dalam beberapa tahun terakhir dan ditandai dengan penggunaan senjata berat di kedua pihak. Thailand dilaporkan mengerahkan jet tempur, sementara kedua pihak melakukan serangan udara dan pemboman. Situasi ini secara langsung menyebabkan memburuknya hubungan bilateral, termasuk pemutusan hubungan diplomatik dan penutupan semua perbatasan resmi (News, 2025). Di luar dimensi politik dan militernya, konflik ini juga telah memengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara. Kamboja telah menghentikan impor bahan bakar dari Thailand, dan Thailand telah menutup beberapa perbatasan dan memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan. Langkah-langkah ini memperburuk dampak sosial-ekonomi pada penduduk di wilayah perbatasan dan meningkatkan tekanan pada mekanisme perdamaian.

Upaya awal untuk menyelesaikan konflik tersebut memuncak pada kesepakatan gencatan senjata pada akhir Juli dan negosiasi selanjutnya. Namun, pertempuran berlanjut hingga akhir tahun. Negosiasi lebih lanjut, termasuk dialog yang dimediasi pihak ketiga,

mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa kesepakatan de-eskalasi sementara, konflik tersebut akan tetap belum terselesaikan hingga akhir tahun 2025. Perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang stabilitas Asia Tenggara. Konflik tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan penduduk sipil tetapi juga berpotensi meningkatkan arus pengungsi lintas batas, mempercepat proliferasi senjata ilegal, dan memperburuk ketegangan politik regional. Dalam konteks ini, peran ASEAN sebagai organisasi regional sekali lagi berada di bawah pengawasan, khususnya mengenai kapasitasnya untuk mengelola dan menyelesaikan konflik antar negara anggotanya.

Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025

ASEAN telah aktif terlibat sebagai mediator regional dalam upaya meredakan konflik antara Thailand dan Kamboja. Sebagai organisasi regional, ASEAN memiliki mandat untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (*Treaty of Amity and Cooperation*). Dalam beberapa pernyataan, ASEAN telah mengutuk peningkatan kekerasan, menyerukan kedua pihak untuk menghentikan permusuhan dan melanjutkan negosiasi, serta menekankan pentingnya solusi damai berdasarkan Piagam ASEAN dan TAC. Pernyataan resmi para menteri luar negeri ASEAN mencerminkan dukungan terhadap dialog dan upaya menuju de-eskalasi bertahap.

Sebagai bagian dari tugas ini, ASEAN mengerahkan tim pengamat untuk memantau situasi di lapangan, mendorong transparansi dalam pelaksanaan gencatan senjata, dan memfasilitasi dialog antara kedua negara yang terlibat. Malaysia, yang memegang jabatan ketua ASEAN untuk tahun 2025, secara aktif terlibat dengan pemerintah Thailand dan Kamboja untuk mendorong dialog bilateral dan mencegah eskalasi lebih lanjut. ASEAN juga memfasilitasi pertemuan antara menteri luar negeri negara-negara yang terkena dampak untuk membahas langkah-langkah de-eskalasi, termasuk seruan untuk gencatan senjata dan dimulainya kembali dialog damai. Upaya-upaya ini sejalan dengan praktik diplomatik ASEAN, yang memprioritaskan penyelesaian konflik secara damai tanpa campur tangan eksternal yang dapat memperburuk ketegangan (Jingga, 2025b).

Selain mediasi, ASEAN juga menggunakan instrumen praktis di lapangan, seperti Tim Pengamat ASEAN (*ASEAN Observer Team*) yang memantau kemajuan dalam meredakan konflik perbatasan. Para pengamat ini dimaksudkan untuk mendorong transparansi dan kepercayaan antara kedua pihak, memastikan kepatuhan terhadap gencatan senjata, dan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap bentrokan bersenjata lebih lanjut. Pendekatan ini menggambarkan transformasi ASEAN dari sekadar forum diplomasi verbal menjadi aktor konkret dalam proses manajemen konflik di kawasan ini (Jingga, 2025a).

Terakhir, peran ASEAN juga didukung oleh suara-suara di dalam organisasi, termasuk seruan dari anggota parlemen regional (Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia) untuk segera mengakhiri kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terkena dampak perang. Lebih lanjut, akademisi dan pemerintah negara-negara anggota memberikan tekanan moral dan politik kepada ASEAN untuk memenuhi perannya dalam penyelesaian konflik secara damai. Hal ini sekaligus memperkuat kredibilitas ASEAN dalam menangani konflik antar anggotanya, menjunjung tinggi prinsip non-intervensi sambil menanggapi ancaman terhadap perdamaian bersama (Elago, 2025).

Tantangan ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025

Salah satu tantangan terbesar ASEAN adalah mekanisme konsensus dan prinsip non-intervensi, yang melemahkan kemampuan blok tersebut untuk bertindak cepat dan tegas dalam krisis internal antar negara anggota. Struktur pengambilan keputusan ASEAN, yang membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota, secara signifikan memperlambat respons terhadap konflik. Akibatnya, upaya mediasi oleh negara-negara ketua seperti Malaysia harus bersifat non-koersif dan bergantung pada kesediaan Thailand dan Kamboja untuk bernegosiasi. Hal ini tercermin dalam berbagai pertemuan dan seruan untuk dialog, yang, meskipun ASEAN telah mengusu gencatan senjata yang langgeng atau solusi jangka panjang.

Lebih lanjut, konflik tersebut semakin diperparah oleh intervensi aktor eksternal dan dinamika geopolitik, yang semakin melemahkan kapasitas ASEAN untuk penyelesaian konflik. Misalnya, terdapat upaya mediasi oleh kekuatan besar seperti Tiongkok, serta keterlibatan bantuan eksternal, termasuk paket bantuan AS senilai jutaan dolar untuk stabilisasi regional setelah gencatan senjata sementara. Hal ini menggambarkan bagaimana aktor di luar ASEAN ikut campur dalam kerangka penyelesaian yang sebenarnya berada dalam wewenang ASEAN. Perbedaan pendapat antara kedua negara mengenai bentuk mediasi, Thailand lebih menyukai perjanjian bilateral, sementara Kamboja juga menganjurkan hukum internasional yang semakin memperumit koordinasi regional (Brunnstrom, David; Psaledakis, 2026).

Terakhir, dampak kemanusiaan dan ekonomi dari konflik tersebut juga telah mengungkap keterbatasan ASEAN dalam mengelola krisis yang memengaruhi kehidupan warga sipil. Mengingat meningkatnya jumlah pengungsi dan kerusakan infrastruktur sipil akibat pertempuran, para anggota parlemen ASEAN bahkan menyerukan gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan yang komprehensif. Ketidakmampuan blok tersebut untuk merespons kebutuhan kemanusiaan dengan cepat telah memicu kritik bahwa ASEAN harus memperkuat mekanisme respons krisisnya untuk menghadapi tantangan tersebut di masa mendatang (Rights, 2025).

Evaluasi Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025

Peran ASEAN dalam konflik ini dapat dinilai dari dua perspektif yakni dari upayanya untuk mendorong dialog dan perannya dalam menerapkan mekanisme de-eskalasi. ASEAN berhasil memfasilitasi pertemuan antara kepala negara Thailand dan Kamboja di forum regional dan secara bersamaan mengerahkan tim pengamat untuk memantau situasi di lapangan. Hal ini menggambarkan respons kolektif ASEAN terhadap ancaman terhadap stabilitas regional. Namun, efektivitas ASEAN juga terhambat oleh fakta bahwa konflik berulang kali berkobar, bahkan setelah beberapa kali gencatan senjata. Hal ini menyoroti kesulitan dalam menerapkan keputusan ASEAN. Kepatuhan ASEAN terhadap prinsip konsensus dan non-intervensi telah mengakibatkan respons yang lambat dan tekanan langsung yang terbatas pada pihak-pihak yang berkonflik.

Secara keseluruhan, peran ASEAN sebagai platform diplomatik yang penting dihargai, tetapi perlu diperkuat lebih lanjut melalui mekanisme respons yang lebih cepat dan kapasitas mediasi yang lebih kuat untuk mencegah konflik bilateral yang lebih besar di masa depan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun ASEAN memainkan peran penting dalam

pengurangan konflik dan koordinasi upaya penyelesaian damai, tantangan signifikan tetap ada dalam menerjemahkan kesepakatan regional menjadi hasil yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ASEAN memainkan peran yang signifikan dalam menangani konflik antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025, terutama sebagai mediator dan fasilitator dialog damai. Melalui mekanisme ASEAN *Way*, pertemuan tingkat menteri, serta pengerahan tim pengamat, ASEAN berhasil mendorong de-eskalasi konflik dan menekan eskalasi kekerasan yang lebih luas. Peran ini menunjukkan komitmen ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan serta mencegah konflik bilateral berkembang menjadi ancaman keamanan regional yang lebih besar.

Namun demikian, efektivitas peran ASEAN masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama akibat prinsip non-intervensi, mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus, serta minimnya instrumen penegakan yang bersifat mengikat. Akibatnya, upaya ASEAN cenderung berfokus pada penciptaan perdamaian negatif dan belum mampu menyelesaikan akar konflik secara struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan ASEAN dan inovasi dalam mekanisme resolusi konflik agar organisasi ini dapat berperan lebih efektif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (2nd ed.)*. Routledge.
- [2] Ba, A. D. (2009). Who's socializing whom? Complex engagement in Sino–ASEAN relations. *The Pacific Review*, 22(4), 527–550. <https://doi.org/10.1080/09512740903314697>
- [3] Brunnstrom, David; Psaledakis, D. (2026). *US to provide \$45 million to help implement Cambodian-Thai accords*. Reuters.
- [4] Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. PT. Revka Petra Media.
- [5] Elago, S. (2025). *ASEAN Parliamentarians for Human Rights: Seruan gencatan senjata dan akses kemanusiaan*. ASEAN Parliamentarians for Human Rights. <https://aseanmp.org/>
- [6] Emmers, R. (2017). ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 30(3), 365–383. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1249902>
- [7] Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191. <https://doi.org/10.1177/002234336900600301>
- [8] Haacke, J. (2003). ASEAN's diplomatic and security culture: Origins, development and prospects. *Contemporary Southeast Asia*, 25(1), 57–87. <https://doi.org/10.1355/CS25-1C>
- [9] Jingga, R. P. A. (2025a). *ASEAN kerahkan tim pengamat dorong deeskalasi konflik Thailand-Kamboja*. ANTARA.

- [10] Jingga, R. P. A. (2025b). Menlu ASEAN segera rapat bahas deeskalasi konflik Thailand-Kamboja. <https://www.antaraneews.com/berita/5302501/menlu-asean-segera-rapat-bahas-deeskalasi-konflik-thailand-kamboja>
- [11] Jones, L. (2010). ASEAN and the norm of non-interference in Southeast Asia: A quest for social order. *Asian Studies Review*, 34(4), 479–502. <https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921>
- [12] Khaswara, F. R. A. Y. H. (2021). *Teori Konflik Menurut Johan Galtung*. Gunung Djati Conference Series.
- [13] News, S. I. (2025). Thailand-Cambodia Border Crisis: What’s Behind the Rising Tensions in 2025? International News. <https://www.siaminternews.com/post/thailand-cambodia-border-crisis-what-s-behind-the-rising-tensions-in-2025>
- [14] Reuters. (2025). Chinese envoy urges Thailand-Cambodia to resume ceasefire as soon as possible. https://www.reuters.com/world/china/chinas-envoy-thailand-cambodia-urges-ceasefire-soon-possible-2025-12-23/?utm_source=chatgpt.com
- [15] Rights, A. P. for H. (2025). ACHR Demands Immediate Ceasefire, Humanitarian Access in Thailand-Cambodia Conflict. ASEAN Parliamentarians for Human Rights. https://aseanmp.org/publications/post/achr-demands-immediate-ceasefire-humanitarian-access-in-thailand-cambodia-conflict/?utm_source=chatgpt.com
- [16] Saputra, B. (2025). *Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja: Ratusan Ribu Warga Mengungsi, Perdagangan ASEAN Terganggu*. Radar Situbondo.
- [17] Setyowati, Herning; Nurulita, A. (2023). The Role of ASEAN in Dispute Resolution between Thailand and Cambodia. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 2.
- [18] Thayer, C. A. (2013). ASEAN’s code of conduct in the South China Sea: A litmus test for community-building? *The Pacific Review*, 26(3), 327–351. <https://doi.org/10.1080/09512748.2013.808931>